

Buku

- Agushamidah. 2010. *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ctk. Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia.
- R. Joni Bambang S. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*, Ctk. Pertama, Bandung: PustakaSetia.
- Victor M. Situmorang. 1994. Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta: PT Ineka Cipta.
- Titik Tedjaningsih. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2016. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ctk. Kelima Ed. Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Bakri. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, ctk.kedua, Malang: UB Press.
- Ridwan Khairandy. 2006. *Pengantar Hukum Dagang*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.
- Syamsudin M. Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*, ctk.pertama, Jakarta: PT. Tatanusa.
- Rahayu Hartini. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, ctk.pertama, Jakarta: Kencana.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undnag-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Imran Nating. 2005. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Ed. Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Aco Nur. 2015. *Hukum Kepailitan:Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*, Ctk.perta, Jakarta: Pilar Yuris Ultima.
- Muhamad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Kelima, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Herowati Poesoko. 2013. *Dinamika Hukum Parate Executie Objek Hak Tanggungan*, Ed. Revisi, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Gunawan Widjaja. 2001. Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Ctk. Kedua, Jakarta: Raja Grafindo.
- H. Zachrowi Soejoeti. 1993. Masyhud Asyhari, *Hukum Jaminan*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Navila.
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Ctk. Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- J Satrio. 2002. *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Ctk. Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Joni Bambang. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*, Ctk. Pertama, Bandung: Pustaka Setia.
- Mustaqiem. 2014. *Hukum Hubungan Industrial Ketenagakerjaan*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Sendjun H. Manulang. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, ctk. Kedua, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Zaeni Asyhadie. 2007. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Surya Tjandra dan Jafar Suryomenggolo. *Makin Terang Bagi Kami Belajar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: TURC)
- Abdul Rachmad Budiono. 1995. *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Ctk. Kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo Persaada.
- Iman Soepomo. 1987. *Hukum Perburuhan: Bidang Hubungan Kerja*, ctk. Keenam, Jakarta: Djambatan.
- Aloysius Uwiyono. Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, Melania Kiswandari 2014. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Ctk. Kedua, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Bakri, M. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, Malang: UB Press.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka.

Sumber Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d78720010b4/buruh-amat-sulit-hadapi-pajak-di-kepailitan> diakses pada tanggal 14 Januari 2016

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d78720010b4/buruh-amat-sulit-hadapi-pajak-di-kepailitan> diakses pada tanggal 14 Januari 2016

Perundang-Undangan

UUD 1945

KUHPerdata

KUHDagang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Putusan MK

Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013